

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal pelaporan auditor dalam laporan keuangan auditan menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam auditing disebut *audit report lag*. Semakin lama *audit report lag* maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya. Menurut Nor *et.al.* (2010), panjang pendeknya *audit report lag* yang terjadi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap emiten atau perusahaan *go public* yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan yang dimuat wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan, sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.

Pengkajian tentang rentang waktu dan keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Berdasarkan Peng-LK-00113/BEI.PPJ/05-2013 yang diterbitkan oleh BEI hingga tanggal 30 April 2013, ada 24 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2012. Sedangkan berdasarkan Peng-LK- 00010/BEI.PNG/05-2014 hingga tanggal 30 April 2014, ada 17 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2013.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan. Menurut Slamet (2005) dalam Swami dan Latrini (2014), keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana manajer (*agent*) memiliki informasi lebih banyak dari pemegang saham (*principal*) dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan manajer itu sendiri. Masalah asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan pelaksanaan *corporate governance*. Selain itu, Adeline (2013) menyatakan bahwa ketika perusahaan telah melaksanakan *corporate governance*, maka perusahaan tersebut sudah memiliki aturan mengenai setiap kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Hal itu membuat sistem perusahaan tertata secara baik, sehingga ketika auditor melakukan proses audit, auditor tidak terlalu banyak menemui kesulitan. Dengan kata lain, adanya *corporate governance* akan dapat memperpendek lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkelanjutan bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Dallas (2004) dalam Nuryaman (2009) menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer. Terkait dengan mekanisme *corporate governance*, Babic (2005) dalam Nuryaman (2009) menyebutkan bahwa mekanisme *corporate governance* terdiri atas mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Mekanisme *corporate governance* terkait dengan dewan direksi, komite audit dan struktur kepemilikan memiliki hubungan erat dengan auditor (Boynton, Johnson dan Kell, 2006:58).

Dewan direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendiri (Boynton, Johnson dan Kell, 2006:58). Menurut Xie *et al* (2003) dalam Wardhani (2013), ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional dan lebih mampu dalam memberikan

pengawasan saat proses pelaporan keuangan, sehingga dewan direksi dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5 menyatakan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dengan persentase yang tinggi dalam perusahaan diindikasikan dapat mengawasi perilaku oportunistik manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari menyembunyian informasi sehingga komisaris independen dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Hashim dan Rahman (2011), menyatakan bahwa keahlian komite audit penting ketika anggota komite audit berhadapan dengan auditor eksternal, hal ini dikarenakan komite audit berperan sebagai mediator antara pihak manajemen dengan auditor eksternal. Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu komite audit yang salah seorang anggotanya harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian muncul persepsi bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan

lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga komite audit dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi yang biasanya merupakan pemegang saham mayoritas. Para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan auditor (Boynton, Johnson and Kell, 2006:59). Menurut Swami dan Latrini (2014), investor institusional dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera sehingga kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* beserta pengaruhnya terhadap *audit report lag* telah banyak dilakukan dan hasilnya bervariasi. Nor *et.al.* (2010) menyimpulkan bahwa komite audit, ukuran dewan direksi, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Wijaya (2012) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Apadore dan Nor (2013) menyimpulkan bahwa komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Wardhani (2013) menyimpulkan bahwa komite audit dan ukuran dewan direksi berpengaruh, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Mubarok (2014) menyimpulkan bahwa komisaris independen dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Swami dan Latrini (2014)

menyimpulkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berbagai penelitian di atas dilakukan di berbagai macam perusahaan, diantaranya yakni perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia maupun di Bursa Efek Indonesia, *property* dan *real estate*, serta perbankan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan industri barang konsumsi dikarenakan perusahaan ini berkembang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir. Terbukti dari jumlah perusahaan industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia meningkat dari tahun 2012-2014. Perusahaan industri barang konsumsi merupakan sub sektor dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki tiga sub sektor, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi. Pada awal tahun 2015, perusahaan manufaktur ditopang oleh industri barang konsumsi. Kenaikan BBM dan pelemahan rupiah tidak memberi dampak besar terhadap penurunan daya beli dan kinerja emiten, karena perusahaan industri barang konsumsi bersifat konsumtif dan banyak diminati masyarakat (Kemenperin, <http://www.kemenperin.go.id>). Selain itu, harga saham pada perusahaan industri barang konsumsi memiliki profit masa depan yang menjajikan, sehingga kebutuhan akan laporan auditor yang merupakan pedoman bagi para investor untuk berinvestasi sangatlah penting. Hal ini membuat peneliti tertarik, apakah dengan menggunakan perusahaan ini *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* atau tidak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disajikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang lebih baik untuk mengurangi *audit report lag*.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Selain itu, menjadi tambahan referensi terhadap peneliti selanjutnya.

1.5.Sistematika Skripsi

Secara garis besar, sistematika skripsi terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Sistematika skripsi dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai sistematika sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori dilakukannya penelitian, yang berkaitan dengan pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Bab ini juga membahas tentang penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis, model analisis, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Diuraikan juga mengenai identifikasi variabel yang digunakan yaitu *audit report lag* sebagai variabel dependen dan *corporate governance* sebagai variabel independen. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum subjek dan objek yang penelitian, yaitu menggunakan sampel data perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, juga diuraikan mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dengan metode statistik, analisis model, pembuktian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*, serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.